# IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR DALAM MENEKAN ANGKA ANAK PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN MAMUJU)

Andi Muhammad Rafly
NPP. 33.1008
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: raflytrplex@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dra. Pratiwi Nurhascaryani, M.Si
Email: pratiwinurhascaryani@ipdn.ac.id

***ABSTRACT***

***Problem Statement:*** *This study is motivated by the persistently high number of school dropouts in Mamuju District, Mamuju Regency, West Sulawesi Province, despite the implementation of the Smart Indonesia Card Program (Kartu Indonesia Pintar/KIP) as an educational assistance policy for students from underprivileged families. This condition indicates a gap between the policy objectives and empirical realities in the field, particularly regarding beneficiary targeting, recipient data management, inter-institutional coordination, socialization, and the administrative capacity of program implementers.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the implementation of the Smart Indonesia Card Program in reducing school dropout rates in Mamuju District, Mamuju Regency, West Sulawesi Province.* ***Method:*** *This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observation, and documentation. Informants were selected using purposive sampling and consisted of representatives from the Department of Education, Youth, and Sports of Mamuju Regency, school officials, teachers, community members, and students involved in the implementation of the KIP Program. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing based on policy implementation dimensions, namely policy instrument choice, policy design, structural control, institutional design, and administrative capacity.* ***Result:*** *The findings show that the implementation of the KIP Program in Mamuju District has been carried out through data collection, verification, beneficiary determination, and aid distribution mechanisms. The program has helped reduce the economic burden on families and supported students in meeting their educational needs. However, its implementation has not been fully optimal due to challenges related to beneficiary data accuracy, implementer coordination, socialization, supervision, and administrative capacity.* ***Conclusion:*** *Therefore, the KIP Program plays an important role in helping reduce school dropout rates, but its effectiveness still needs to be strengthened through improved implementation quality at the regional and school levels.*

***Keywords:*** *Policy Implementation; Smart Indonesia Card; Education; School Dropout; Mamuju*

**ABSTRAK**

**Permasalahan:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka anak putus sekolah di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, meskipun Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah dilaksanakan sebagai salah satu kebijakan bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan

antara tujuan kebijakan dengan kondisi empiris di lapangan, terutama terkait ketepatan sasaran, pengelolaan data penerima, koordinasi antarlembaga, sosialisasi, dan kapasitas administrasi pelaksana program. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kartu Indonesia Pintar dalam menekan angka anak putus sekolah di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara purposive, meliputi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju, pihak sekolah, guru, masyarakat, serta peserta didik yang berkaitan dengan pelaksanaan Program KIP. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan dimensi implementasi kebijakan, yaitu pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, kontrol struktur, desain institusi, dan kapasitas administrasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program KIP di Kecamatan Mamuju telah berjalan melalui mekanisme pendataan, verifikasi, penetapan penerima, dan penyaluran bantuan. Program ini membantu meringankan beban ekonomi keluarga serta mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan peserta didik. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala pada akurasi data penerima, koordinasi pelaksana, sosialisasi, pengawasan, dan kapasitas administrasi. **Kesimpulan:** Dengan demikian, Program KIP memiliki peran penting dalam membantu menekan angka anak putus sekolah, tetapi efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas implementasi di tingkat daerah dan satuan pendidikan.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan; Kartu Indonesia Pintar; Pendidikan; Putus Sekolah; Mamuju.

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Akses pendidikan yang merata tidak hanya menjadi kebutuhan individual peserta didik, tetapi juga menjadi kepentingan publik karena berkaitan langsung dengan pembangunan sosial, ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk menyelesaikan pendidikan, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu. Keterbatasan ekonomi keluarga sering menjadi penyebab utama rendahnya keberlanjutan pendidikan, karena biaya transportasi, perlengkapan sekolah, uang saku, dan kebutuhan penunjang pembelajaran lainnya tetap menjadi beban meskipun pendidikan dasar telah memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi salah satu penyebab utama anak mengalami putus sekolah, terutama pada keluarga berpenghasilan rendah dan masyarakat di wilayah pedesaan (Setyadharma, 2018). Bantuan tunai pendidikan bagi siswa miskin juga dinilai memiliki peran penting dalam mengurangi tekanan ekonomi keluarga serta mencegah anak terlibat dalam aktivitas kerja yang dapat mengganggu keberlanjutan pendidikan (Hidayatina & Garces-Ozanne, 2019).

Sebagai bentuk intervensi kebijakan sosial di bidang pendidikan, pemerintah Indonesia melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini dirancang untuk membantu peserta didik dari keluarga miskin dan rentan miskin agar tetap memperoleh layanan pendidikan, mencegah anak putus sekolah, serta mendorong anak yang telah putus sekolah agar kembali mengikuti pendidikan formal maupun nonformal. PIP merupakan bagian dari kebijakan jaminan sosial bidang pendidikan yang diarahkan kepada siswa dari keluarga kurang mampu agar memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih setara (Retnaningsih, 2017). KIP sebagai instrumen pelaksanaan PIP juga menjadi bentuk bantuan tunai pendidikan yang ditujukan bagi anak usia sekolah dari kelompok ekonomi rentan, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi

persoalan ketepatan sasaran dan pemerataan penerima bantuan (Gutama et al., 2021). Implementasi PIP melalui KIP pada dasarnya dapat mendukung pemerataan pendidikan karena membantu siswa yang memiliki keterbatasan biaya untuk tetap melanjutkan sekolah (Rohaeni & Saryono, 2018).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bantuan pendidikan seperti KIP berpotensi menurunkan angka putus sekolah apabila dilaksanakan secara tepat sasaran. Peningkatan jumlah penerima KIP memiliki hubungan dengan penurunan angka putus sekolah, sedangkan penurunan jumlah penerima bantuan dapat berpengaruh terhadap kenaikan angka putus sekolah (Nikmah et al., 2020). PIP juga dinilai lebih efektif dibandingkan program Bantuan Siswa Miskin dalam menurunkan kemungkinan peserta didik putus sekolah pada jenjang SD, SMP, dan SMA, khususnya bagi peserta didik dari keluarga miskin (Listiyanto & Qibthiyyah, 2022). Selain itu, bantuan tunai bersyarat seperti PIP dapat meningkatkan peluang anak di wilayah pedesaan untuk melanjutkan pendidikan menengah, meskipun keberhasilannya tetap dipengaruhi oleh pemahaman keluarga, kesederhanaan mekanisme program, keamanan sistem pembayaran, dan pengawasan berbasis teknologi (Susilo & Wahyudi, 2020).

Meskipun memiliki tujuan strategis, implementasi KIP tidak terlepas dari berbagai persoalan di lapangan. Permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan PIP antara lain distribusi KIP yang belum merata, pencairan dana yang tidak utuh, penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pemantauan program (Dimmera & Purnasari, 2020). Hambatan lain dalam pelaksanaan PIP meliputi kurang akuratnya penentuan calon penerima, keterlambatan pencairan dana, minimnya sosialisasi, lamanya proses verifikasi, serta rendahnya kesadaran wali murid terhadap penggunaan dana bantuan (Jumanah & Rosita, 2022). KIP memang dapat mendukung pemerataan pendidikan, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa perubahan mekanisme, potensi penyalahgunaan dana, serta kesulitan dalam pembuktian pemanfaatan bantuan oleh penerima (Sari et al., 2021).

Permasalahan implementasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan KIP tidak hanya ditentukan oleh keberadaan bantuan dana, tetapi juga oleh kualitas tata kelola program. Implementasi PIP perlu memperhatikan kesesuaian tujuan, standar operasional, serta koordinasi pelaksana di tingkat sekolah dan daerah agar program berjalan sesuai dengan sasaran kebijakan (Rakista, 2020). Implementasi PIP di daerah juga memerlukan dukungan aktor pelaksana yang memahami peran masing-masing, sehingga program tidak hanya berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat miskin (Putri et al., 2024). Bahkan, apabila konteks, masukan, dan proses pelaksanaan telah berjalan cukup baik, aspek hasil belum tentu sesuai harapan apabila angka putus sekolah masih meningkat atau belum mengalami penurunan yang signifikan (Iwan & Rachmawati, 2024). Dengan demikian, efektivitas KIP harus dilihat secara menyeluruh, mulai dari pendataan, validasi penerima, penyaluran, pemanfaatan dana, pengawasan, hingga dampaknya terhadap keberlanjutan pendidikan peserta didik.

Kondisi tersebut relevan dengan permasalahan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Kecamatan Mamuju masih menghadapi persoalan angka anak putus sekolah yang cukup tinggi. Data dalam skripsi menunjukkan bahwa Kecamatan Mamuju menjadi kecamatan dengan angka anak putus sekolah terbesar kedua di Sulawesi Barat, yaitu sebanyak 451 anak, setelah Kecamatan Kalukku sebanyak 534 anak. Sebelum adanya Program KIP, Kabupaten Mamuju disebut memiliki permasalahan angka anak putus sekolah sekitar 10.000 anak. Meskipun angka tersebut telah berkurang setelah adanya program, Kecamatan Mamuju masih menunjukkan persoalan putus sekolah yang belum terselesaikan secara optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan KIP belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan pendidikan di tingkat lokal apabila tidak didukung oleh data penerima yang akurat, koordinasi lintas sektor, sosialisasi yang memadai, serta keterlibatan masyarakat.

Dalam konteks Kecamatan Mamuju, permasalahan implementasi KIP tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi, sosial, administratif, dan geografis. Keterbatasan ekonomi keluarga menyebabkan sebagian anak rentan tidak melanjutkan pendidikan, sementara rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme KIP dapat menghambat pemanfaatan program secara optimal. Di

sisi lain, kelemahan dalam pembaruan data penerima, keterbatasan sumber daya manusia pelaksana, serta kurangnya koordinasi antara sekolah, dinas pendidikan, perangkat desa/kelurahan, dan pihak penyalur bantuan dapat menyebabkan bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran. Evaluasi terhadap PIP perlu memperhatikan akses pendidikan, pemanfaatan bantuan, serta ketepatan program dalam menjangkau peserta didik yang membutuhkan (Yusup et al., 2019). Implementasi PIP bagi siswa sekolah dasar juga membutuhkan koordinasi dan pengawasan yang jelas agar bantuan benar-benar mendukung keberlanjutan pendidikan peserta didik (Rahman & Asmara, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai implementasi Program Kartu Indonesia Pintar dalam menekan angka anak putus sekolah di Kecamatan Mamuju menjadi penting dilakukan. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas implementasi KIP/PIP di berbagai daerah, seperti Bengkayang, Tasikmalaya, Watampone, Banyumas, Serang, Sukabumi, dan wilayah pedesaan di Indonesia. Namun, kajian yang secara khusus membahas implementasi KIP dalam menekan angka anak putus sekolah di Kecamatan Mamuju masih terbatas. Padahal, setiap daerah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, budaya, geografis, serta kapasitas kelembagaan yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dari sisi lokus dan konteks masalah, karena berfokus pada pelaksanaan Program KIP di Kecamatan Mamuju sebagai wilayah yang masih menghadapi angka anak putus sekolah tinggi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana implementasi KIP berjalan, bagaimana kendala implementasi muncul di tingkat lokal, serta bagaimana penguatan kebijakan dapat diarahkan agar Program KIP lebih tepat sasaran, adaptif, dan berdampak nyata dalam menekan angka anak putus sekolah.

## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penelitian mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah banyak dilakukan dalam berbagai konteks, baik pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah, maupun dalam kajian kebijakan pendidikan secara umum. Sebagian besar penelitian terdahulu menunjukkan bahwa PIP/KIP merupakan salah satu instrumen kebijakan pendidikan yang memiliki peran penting dalam membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan. Penelitian (Retnaningsih, 2017) menjelaskan bahwa Program Indonesia Pintar merupakan bagian dari kebijakan jaminan sosial bidang pendidikan yang diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi siswa miskin dan rentan miskin. Penelitian (Rohaeni & Saryono, 2018) juga menunjukkan bahwa implementasi PIP melalui KIP dapat mendukung pemerataan pendidikan karena bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah, seperti perlengkapan belajar, transportasi, dan kebutuhan pendidikan lainnya. Namun demikian, penelitian tersebut lebih banyak menitikberatkan pada pelaksanaan program dalam mendukung pemerataan pendidikan secara umum, belum secara spesifik mengkaji efektivitas implementasi KIP dalam menekan angka anak putus sekolah pada wilayah dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis tertentu seperti Kecamatan Mamuju.

Beberapa penelitian lain telah membahas hubungan antara bantuan pendidikan dan penurunan angka putus sekolah. Penelitian (Nikmah et al., 2020) menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penerima KIP memiliki keterkaitan dengan penurunan angka putus sekolah, sedangkan penurunan jumlah penerima bantuan dapat memengaruhi kenaikan angka putus sekolah. Penelitian (Listiyanto & Qibthiyyah, 2022) juga menemukan bahwa PIP lebih efektif dibandingkan Bantuan Siswa Miskin dalam mengurangi kemungkinan peserta didik putus sekolah pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain itu, penelitian (Setyadharma, 2018) menegaskan bahwa bantuan tunai pemerintah berpengaruh terhadap keberlanjutan pendidikan anak di wilayah pedesaan, sementara penelitian (Hidayatina & Garces-Ozanne, 2019) menunjukkan bahwa bantuan tunai pendidikan dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi keluarga dan menekan risiko anak bekerja sehingga berpotensi mendukung keberlanjutan pendidikan. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih melihat dampak bantuan pendidikan dari sisi hubungan program dengan akses pendidikan atau angka putus sekolah secara umum, sehingga belum secara mendalam menjelaskan bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut berjalan di tingkat kecamatan, terutama pada daerah yang masih memiliki angka anak putus sekolah tinggi meskipun program bantuan telah berjalan.

Di sisi lain, beberapa penelitian menemukan bahwa pelaksanaan KIP/PIP masih menghadapi berbagai kendala administratif dan kelembagaan. Penelitian (Dimmera & Purnasari, 2020) menunjukkan bahwa permasalahan PIP dapat muncul dalam bentuk distribusi KIP yang belum merata, penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, rendahnya pemahaman masyarakat, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pemantauan program. Penelitian (Jumanah & Rosita, 2022) juga menjelaskan bahwa hambatan PIP mencakup kurang akuratnya penentuan calon penerima, keterlambatan pencairan dana, minimnya sosialisasi, dan lamanya proses verifikasi data. Temuan serupa juga terdapat dalam penelitian (Sari et al., 2021) yang menunjukkan bahwa implementasi KIP masih menghadapi kendala perubahan mekanisme, potensi penyalahgunaan dana, serta kesulitan dalam pembuktian pemanfaatan bantuan. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut belum secara khusus menghubungkan persoalan administratif, koordinasi antarlembaga, dan pemanfaatan data penerima dengan kondisi lokal Kecamatan Mamuju yang masih menghadapi tingginya angka anak putus sekolah.

Kajian mengenai implementasi kebijakan pendidikan juga menunjukkan bahwa keberhasilan program bantuan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya anggaran atau bantuan tunai, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, koordinasi, dan kapasitas pelaksana. Penelitian (Rakista, 2020) menunjukkan bahwa implementasi PIP perlu memperhatikan kesesuaian tujuan program, standar operasional, dan koordinasi pelaksana di tingkat sekolah maupun pemerintah daerah. Penelitian (Yusup et al., 2019) menegaskan bahwa evaluasi PIP perlu melihat akses pendidikan, pemanfaatan bantuan, dan ketepatan sasaran program. Penelitian (Rahman & Asmara, 2020) juga menunjukkan bahwa implementasi PIP bagi siswa sekolah dasar membutuhkan koordinasi dan pengawasan yang jelas agar bantuan benar-benar mendukung keberlanjutan pendidikan peserta didik. Selain itu, penelitian (Madjid et al., 2021) pada implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah menunjukkan bahwa kebijakan bantuan pendidikan membutuhkan pendataan, penyaluran, sumber daya manusia, dan koordinasi yang memadai agar pelaksanaannya tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu mendukung tujuan pendidikan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih lebih banyak membahas implementasi program pendidikan secara umum, sehingga masih terdapat ruang kajian untuk menganalisis implementasi KIP secara lebih kontekstual berdasarkan dimensi implementasi kebijakan pada lokus Kecamatan Mamuju.

Kesenjangan penelitian juga terlihat dari sisi lokus dan karakteristik masalah. Berbagai penelitian terdahulu dilakukan di daerah yang berbeda, seperti Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Kota Serang, Kabupaten Banyumas, dan beberapa wilayah lainnya. Penelitian (Zamaludin et al., 2024) misalnya, membahas implementasi KIP dalam upaya pemerataan pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, sedangkan penelitian (Rohaeni & Saryono, 2018) berfokus pada SMP Negeri di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian (Putri et al., 2024) membahas implementasi PIP di Kota Serang, sedangkan penelitian (Iwan & Rachmawati, 2024) menilai evaluasi PIP dalam mendukung wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Sukabumi. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami pelaksanaan PIP/KIP di berbagai daerah, tetapi belum secara khusus membahas Kecamatan Mamuju sebagai wilayah yang memiliki persoalan angka anak putus sekolah cukup tinggi. Padahal, Kecamatan Mamuju memiliki karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan administratif yang berbeda dengan daerah-daerah tersebut, sehingga implementasi KIP perlu dianalisis secara lebih kontekstual sesuai dengan kondisi lokal.

Kesenjangan lainnya terletak pada pendekatan analisis yang digunakan. Sebagian penelitian terdahulu masih menempatkan KIP sebagai program bantuan pendidikan yang dinilai dari sisi efektivitas, pemerataan, atau ketepatan sasaran secara umum. Sementara itu, penelitian ini menggunakan perspektif implementasi kebijakan Christoph Knill dan Jale Tosun yang menekankan pentingnya interaksi antara kebijakan dari tingkat atas, kapasitas pelaksana, desain kelembagaan, kontrol struktur, serta dinamika aktor lokal. Pendekatan ini penting karena pelaksanaan KIP tidak hanya bergantung pada keputusan pemerintah pusat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah, sekolah, perangkat desa/kelurahan, lembaga penyalur, dan masyarakat dalam menjalankan program. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kebijakan sosial untuk mengatasi kemiskinan dan keterbatasan akses masyarakat memerlukan sinergi antara kebijakan pusat dan

pelaksanaan di daerah agar manfaat program dapat diterima secara tepat oleh kelompok sasaran (Murdiyana & Mulyana, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melihat KIP sebagai bantuan dana pendidikan, tetapi juga sebagai kebijakan publik yang keberhasilannya ditentukan oleh instrumen kebijakan, desain kebijakan, kontrol struktur, desain institusi, dan kapasitas administrasi pelaksana.

Berdasarkan kondisi tersebut, kesenjangan penelitian dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara spesifik menganalisis implementasi Program Kartu Indonesia Pintar dalam menekan angka anak putus sekolah di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini penting karena Kecamatan Mamuju masih memiliki angka anak putus sekolah yang tinggi, yaitu 451 anak, meskipun Program KIP telah dilaksanakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji keberadaan KIP sebagai program bantuan pendidikan, tetapi juga menganalisis bagaimana pelaksanaannya berjalan pada tingkat lokal, bagaimana koordinasi antarlembaga dilakukan, bagaimana data penerima dikelola, serta bagaimana kapasitas administrasi pelaksana memengaruhi keberhasilan program. Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran yang lebih mendalam, kontekstual, dan empiris mengenai implementasi KIP dalam menekan angka anak putus sekolah di Kecamatan Mamuju.

## 1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi semakin penting untuk dilakukan dalam konteks dinamika ekonomi daerah yang saat ini dihadapkan pada ketidakpastian global, transformasi struktural ekonomi, serta tuntutan peningkatan daya saing daerah. Studi terbaru menunjukkan bahwa efektivitas investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya nilai investasi, tetapi juga oleh kualitas kebijakan, kesiapan institusi, serta kapasitas daerah dalam mengelola dan memanfaatkan investasi secara optimal (Nguyen, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah berpotensi mengalami ketidaktepatan dalam merumuskan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Secara keilmuan, penelitian ini memiliki urgensi untuk memperkaya kajian ekonomi pembangunan daerah, khususnya dalam memahami bagaimana interaksi antara PMDN dan PMA memengaruhi pertumbuhan ekonomi pada level kabupaten. Penelitian terbaru menekankan bahwa analisis pada level mikro-regional sangat diperlukan karena adanya perbedaan karakteristik ekonomi antar daerah yang menyebabkan hasil penelitian pada tingkat nasional tidak selalu relevan ketika diterapkan pada tingkat lokal (Aulia et al., 2024). Oleh karena itu, tanpa adanya penelitian yang spesifik dan kontekstual seperti ini, pengembangan teori dan model kebijakan investasi daerah akan cenderung bersifat generalisasi dan kurang adaptif terhadap kondisi riil di lapangan.

Dari sisi permasalahan empiris, urgensi penelitian ini terletak pada adanya fenomena ketidaksesuaian antara peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah, termasuk Kabupaten Situbondo. Jika fenomena ini tidak dikaji secara mendalam, maka terdapat risiko bahwa peningkatan investasi yang terjadi tidak memberikan dampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kegagalan dalam mengoptimalkan investasi dapat menyebabkan inefisiensi alokasi sumber daya, rendahnya produktivitas ekonomi, serta tidak tercapainya efek pengganda (*multiplier effect*) yang diharapkan dari investasi (Sari et al., 2025). Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas investasi di daerah.

Secara praktis, urgensi penelitian ini sangat relevan bagi pemerintah daerah, khususnya dalam merumuskan kebijakan investasi yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. Tanpa adanya kajian empiris yang mendalam, kebijakan yang diambil berpotensi tidak tepat sasaran, misalnya dalam penentuan prioritas sektor investasi, pemberian insentif, maupun strategi peningkatan daya tarik investasi daerah. Penelitian terbaru menegaskan bahwa kebijakan investasi yang tidak berbasis pada analisis yang komprehensif dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperlebar kesenjangan pembangunan antar wilayah (Dewi et al., 2024). Oleh karena itu, hasil penelitian ini

diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi kebijakan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka terdapat potensi terjadinya kesalahan dalam memahami hubungan antara PMDN, PMA, dan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Hal ini dapat berdampak pada tidak optimalnya pemanfaatan investasi sebagai instrumen pembangunan, rendahnya efektivitas kebijakan ekonomi daerah, serta terhambatnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memiliki urgensi akademik, tetapi juga urgensi praktis dalam mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat dan berbasis data di Kabupaten Situbondo.

## 1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh berbagai penelitian terdahulu yang membahas implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), baik dalam konteks pemerataan pendidikan, ketepatan sasaran bantuan, maupun upaya menekan angka putus sekolah. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa KIP/PIP merupakan salah satu instrumen kebijakan pendidikan yang berperan penting dalam membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses layanan pendidikan. Namun demikian, setiap penelitian memiliki perbedaan dalam hal lokus, metode, teori, serta fokus kajian yang digunakan.

Penelitian (Gutama et al., 2021) mengkaji implementasi Program Kartu Indonesia Pintar berdasarkan basis nilai keadilan dalam kebijakan sosial. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa KIP merupakan bentuk kebijakan sosial yang diarahkan untuk memberikan bantuan pendidikan kepada anak dari keluarga kurang mampu. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan ketepatan sasaran, karena masih terdapat peserta didik yang layak menerima bantuan tetapi belum terakomodasi dalam program. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas implementasi KIP sebagai kebijakan sosial di bidang pendidikan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada nilai keadilan dalam kebijakan sosial, sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi KIP dalam menekan angka anak putus sekolah di Kecamatan Mamuju.

Penelitian (Sari et al., 2021) membahas implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan di MTsN 1 Watampone. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa KIP memberikan manfaat bagi peserta didik dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti perlengkapan sekolah dan biaya penunjang pembelajaran. Namun, penelitian tersebut juga menemukan beberapa hambatan, seperti perubahan mekanisme program, potensi penyalahgunaan dana, serta belum optimalnya pembuktian penggunaan bantuan oleh penerima. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai implementasi KIP dalam mendukung akses pendidikan. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada satu satuan pendidikan, sedangkan penelitian penulis mengkaji implementasi KIP pada tingkat kecamatan dengan memperhatikan persoalan anak putus sekolah.

Penelitian (Jumanah & Rosita, 2022) meneliti evaluasi Program Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa PIP memiliki kontribusi dalam membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat bersekolah. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi hambatan berupa kurang akuratnya penentuan calon penerima, keterlambatan pencairan dana, minimnya sosialisasi, serta lamanya proses verifikasi data. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama menyoroti persoalan administratif dan teknis dalam pelaksanaan bantuan pendidikan. Perbedaannya, penelitian penulis tidak hanya

melihat pemerataan pendidikan secara umum, tetapi juga menghubungkannya dengan upaya menekan angka anak putus sekolah di Kecamatan Mamuju.

Penelitian (Listiyanto & Qibthiyyah, 2022) menganalisis dampak program bantuan pendidikan terhadap angka putus sekolah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PIP memiliki pengaruh dalam menurunkan kemungkinan peserta didik putus sekolah, khususnya pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa bantuan pendidikan dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan pendidikan peserta didik dari keluarga miskin. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada perhatian terhadap hubungan antara bantuan pendidikan dan penurunan angka putus sekolah. Namun, penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan cakupan yang lebih luas, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami proses implementasi KIP secara lebih mendalam pada konteks lokal Kecamatan Mamuju.

Penelitian (Madjid et al., 2021) mengkaji implementasi program dana Bantuan Operasional Sekolah pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Bandung. Walaupun tidak secara langsung membahas KIP, penelitian tersebut relevan karena sama-sama mengkaji implementasi kebijakan bantuan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program bantuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh pendataan, penyaluran, kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi pelaksana. Penelitian ini menjadi rujukan penting karena menunjukkan bahwa program pendidikan tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan anggaran, tetapi juga dari tata kelola implementasinya. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada Bantuan Operasional Sekolah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada Program KIP dalam menekan angka anak putus sekolah.

Penelitian (Zamaludin et al., 2024) membahas implementasi Program Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan sekolah dasar negeri di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KIP membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu untuk tetap bersekolah, tetapi masih terdapat kendala dalam validasi data, distribusi bantuan, dan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas implementasi KIP pada tingkat wilayah tertentu. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada pemerataan pendidikan sekolah dasar, sedangkan penelitian penulis secara khusus mengkaji implementasi KIP dalam menekan angka anak putus sekolah di Kecamatan Mamuju.

Penelitian (Putri et al., 2024) meneliti implementasi Program Indonesia Pintar di Kota Serang dengan menggunakan perspektif implementasi kebijakan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PIP dapat berjalan apabila didukung oleh lingkungan kebijakan, hubungan antarorganisasi, sumber daya organisasi, serta karakteristik pelaksana yang memadai. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis karena sama-sama menempatkan PIP/KIP sebagai kebijakan publik yang membutuhkan koordinasi antarlembaga. Perbedaannya, penelitian tersebut dilakukan di wilayah perkotaan, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kecamatan Mamuju yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis berbeda serta masih menghadapi angka anak putus sekolah yang cukup tinggi.

Penelitian (Iwan & Rachmawati, 2024) mengevaluasi kebijakan Program Indonesia Pintar dalam mendukung implementasi wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek konteks, masukan, dan proses dalam pelaksanaan program dapat berjalan cukup baik, tetapi aspek hasil belum sepenuhnya sesuai harapan apabila angka putus sekolah masih mengalami peningkatan. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama menilai keberhasilan PIP/KIP tidak hanya dari sisi proses administratif, tetapi juga dari hasil yang dicapai

terhadap keberlanjutan pendidikan. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada evaluasi wajib belajar 12 tahun, sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi KIP dalam menekan angka anak putus sekolah di Kecamatan Mamuju.

Penelitian (Suhada, 2024) membahas implementasi Program Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan di SDN Tonjong 1. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa KIP membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat, tetapi masih membutuhkan peningkatan dalam aspek sosialisasi, pendataan, dan pengawasan penggunaan bantuan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas KIP sebagai program bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Perbedaannya, penelitian tersebut dilakukan pada satu sekolah dasar, sedangkan penelitian penulis memiliki cakupan lokus yang lebih luas, yaitu Kecamatan Mamuju.

Penelitian (Saputra, 2025) mengkaji implementasi kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KIP memiliki peran dalam membuka akses pendidikan, tetapi pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas KIP sebagai kebijakan publik yang keberhasilannya bergantung pada proses implementasi. Perbedaannya, penelitian penulis menggunakan teori implementasi kebijakan Christoph Knill dan Jale Tosun dengan menitikberatkan pada instrumen kebijakan, desain kebijakan, kontrol struktur, desain institusi, dan kapasitas administrasi dalam konteks Kecamatan Mamuju.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Program KIP/PIP memiliki kontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan, membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu, serta mendukung upaya pencegahan anak putus sekolah. Namun, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama pada aspek ketepatan sasaran, validasi data, koordinasi antarlembaga, sosialisasi, pengawasan, serta kapasitas pelaksana. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini berupaya melengkapi kajian yang sudah ada dengan menganalisis implementasi Program Kartu Indonesia Pintar dalam menekan angka anak putus sekolah di Kecamatan Mamuju. Kebaruan penelitian ini terletak pada lokus penelitian, konteks masalah, serta penggunaan perspektif implementasi kebijakan Christoph Knill dan Jale Tosun untuk memahami pelaksanaan KIP secara lebih komprehensif dan kontekstual.

## 1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang membedakannya dari penelitian terdahulu, terutama dari segi lokus, fokus kajian, teori, dan konteks hasil penelitian. Dari sisi lokus, penelitian ini secara spesifik dilakukan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, yang masih jarang dikaji dalam penelitian mengenai Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), sehingga memberikan perspektif yang lebih kontekstual mengenai implementasi kebijakan pendidikan pada tingkat lokal. Dari sisi fokus kajian, penelitian ini tidak hanya membahas KIP sebagai program bantuan pendidikan, tetapi secara khusus menganalisis implementasinya dalam menekan angka anak putus sekolah, sehingga penelitian ini lebih menekankan keterkaitan antara pelaksanaan kebijakan, ketepatan sasaran, koordinasi antarlembaga, kapasitas administrasi, dan keberlanjutan pendidikan peserta didik. Dari sisi teori, penelitian ini menggunakan perspektif implementasi kebijakan Christoph Knill dan Jale Tosun yang menekankan pentingnya pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, kontrol struktur, desain institusi, dan kapasitas administrasi, berbeda dengan sebagian penelitian terdahulu yang lebih banyak menggunakan pendekatan evaluasi program atau teori

implementasi kebijakan klasik. Kebaruan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan implementasi program pendidikan tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada pendataan, penyaluran, sumber daya manusia, serta koordinasi pelaksana yang memadai (Madjid et al., 2021). Selain itu, implementasi kebijakan publik pada tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata, koordinasi antaraktor, serta kesesuaian kebijakan dengan kondisi wilayah (Wijaya & Aprilia, 2020). Penelitian ini juga memperkuat pandangan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh dukungan kelembagaan, sumber daya, komunikasi, dan keterlibatan aktor terkait dalam proses pelaksanaan kebijakan (Daffa Athallah et al., 2024). Dalam konteks kebijakan pendidikan, pelaksanaan kebijakan di daerah memerlukan dukungan regulasi teknis, koordinasi, pemahaman masyarakat, serta kesiapan sistem pelaksana agar tujuan pemerataan akses pendidikan dapat tercapai secara optimal (Prihatini et al., 2024). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam memperluas kajian implementasi kebijakan pendidikan dengan menempatkan Kecamatan Mamuju sebagai lokus penelitian, Program KIP sebagai objek kebijakan, dan persoalan anak putus sekolah sebagai isu utama yang dianalisis secara lebih kontekstual.

### 1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kartu Indonesia Pintar dalam menekan angka anak putus sekolah di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik masalah penelitian yang berfokus pada implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam menekan angka anak putus sekolah di Kecamatan Mamuju. Permasalahan implementasi kebijakan tidak cukup dipahami hanya melalui angka atau data statistik, tetapi perlu dianalisis melalui proses pelaksanaan, peran aktor, mekanisme koordinasi, ketepatan sasaran, kendala administrasi, serta pengalaman pelaksana dan penerima manfaat di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berusaha memahami makna suatu fenomena secara alamiah melalui interaksi langsung dengan sumber data, sehingga pendekatan ini dinilai tepat untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan KIP di Kecamatan Mamuju (Sugiyono, 2020). Selain itu, dalam kajian pemerintahan, pendekatan kualitatif relevan digunakan untuk memahami gejala pemerintahan dan kebijakan publik secara empirik, kontekstual, serta sesuai dengan dinamika sosial yang terjadi di lapangan (Simangunsong, 2017).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki pengetahuan, kewenangan, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program KIP di Kecamatan Mamuju. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu karena dianggap memahami permasalahan penelitian dan mampu memberikan informasi yang relevan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju karena memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan informasi strategis terkait pelaksanaan kebijakan pendidikan, termasuk Program KIP. Selain itu, informan pendukung meliputi Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju, Kepala Sekolah, Guru, serta

masyarakat dan murid sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan dan penerimaan manfaat program. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data secara komprehensif dari sisi pengambil kebijakan, pelaksana teknis, satuan pendidikan, dan kelompok sasaran program. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Dinas Pendidikan, data pendidikan, arsip pelaksanaan program, peraturan perundang-undangan, laporan, jurnal, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan implementasi Program KIP.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama. Pertama, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi pelaksanaan Program KIP di Kecamatan Mamuju, terutama berkaitan dengan proses pendataan, penyaluran, pemanfaatan bantuan, dan kendala yang muncul di lapangan. Kedua, wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti tetap memiliki pedoman pertanyaan, tetapi tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan informasi secara luas sesuai pengalaman dan pengetahuannya. Ketiga, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis, arsip, foto kegiatan, laporan resmi, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Program KIP. Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pemerintah daerah, pihak sekolah, guru, masyarakat, dan murid. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar data yang diperoleh lebih akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2020).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah, merangkum, dan memfokuskan data yang relevan dengan implementasi Program KIP berdasarkan dimensi teori implementasi kebijakan Christoph Knill dan Jale Tosun, yaitu pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, kontrol struktur, desain institusi, dan kapasitas administrasi. Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ke dalam uraian naratif yang sistematis agar pola temuan dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan data yang telah disajikan untuk memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan Program KIP dalam menekan angka anak putus sekolah di Kecamatan Mamuju. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju dengan lokus kajian di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan jadwal penelitian dalam skripsi, kegiatan penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026, khususnya pada periode Desember 2025 sampai Januari 2026, yang mencakup observasi lapangan, pelaksanaan wawancara, pengumpulan dokumentasi, serta pengolahan data penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam menekan angka anak putus sekolah di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Program KIP merupakan salah satu bentuk kebijakan pendidikan yang diarahkan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan sekolah dan terhindar dari risiko putus sekolah. Dalam konteks Kecamatan Mamuju, program ini menjadi penting karena masih terdapat persoalan anak putus sekolah yang cukup tinggi, sehingga pelaksanaan KIP perlu dilihat tidak hanya dari aspek penyaluran bantuan, tetapi juga dari bagaimana program tersebut diimplementasikan oleh aktor-aktor pelaksana di tingkat daerah dan satuan pendidikan.

Pembahasan pada bagian ini difokuskan pada implementasi Program KIP sebagai inti dari penelitian, sehingga tidak lagi dipisahkan secara khusus ke dalam pembahasan faktor pendukung, faktor penghambat, maupun upaya, melainkan diintegrasikan ke dalam analisis setiap dimensi. Hal ini dilakukan agar hasil pembahasan lebih sistematis dan langsung menjawab tujuan penelitian, yaitu menganalisis implementasi Program KIP dalam menekan angka anak putus sekolah di Kecamatan Mamuju. Data yang digunakan dalam pembahasan diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan dimensi implementasi kebijakan menurut Christoph Knill dan Jale Tosun yang mencakup pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, kontrol struktur, desain institusi, dan kapasitas administrasi (Knill & Tosun, 2020).

Melalui lima dimensi tersebut, implementasi Program KIP dapat dipahami secara lebih komprehensif. Dimensi pilihan instrumen kebijakan digunakan untuk melihat kesesuaian bantuan tunai pendidikan dengan tujuan menekan angka putus sekolah. Dimensi desain kebijakan digunakan untuk menganalisis kejelasan isi kebijakan, keterlibatan aktor, tujuan, dan strategi pelaksanaan program. Dimensi kontrol struktur digunakan untuk melihat mekanisme pengawasan, monitoring, dan pelaporan dalam pelaksanaan KIP. Dimensi desain institusi digunakan untuk memahami kejelasan struktur pelaksana serta pembagian peran dan tanggung jawab antarlembaga. Sementara itu, dimensi kapasitas administrasi digunakan untuk menilai kemampuan sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana prasarana, serta manajemen pelaksanaan program. Dengan demikian, pembahasan berikut disusun berdasarkan masing-masing dimensi agar dapat menggambarkan secara utuh bagaimana implementasi Program KIP berjalan dalam menekan angka anak putus sekolah di Kecamatan Mamuju.

### 3.1 Pilihan Instrumen Kebijakan

Dimensi pilihan instrumen kebijakan dalam implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kecamatan Mamuju dilihat dari kesesuaian instrumen dengan tujuan kebijakan serta efektivitas instrumen dalam pelaksanaannya. Instrumen utama yang digunakan dalam Program KIP adalah bantuan tunai pendidikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu. Instrumen ini dinilai sesuai dengan tujuan kebijakan karena secara langsung menyasar salah satu penyebab utama anak putus sekolah, yaitu keterbatasan ekonomi keluarga. Dalam pelaksanaannya, bantuan KIP digunakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan peserta didik, seperti pembelian seragam, alat tulis, buku, biaya transportasi, dan kebutuhan sekolah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual, bantuan tunai merupakan instrumen yang relevan untuk menjaga keberlanjutan pendidikan anak dan mengurangi risiko putus sekolah di Kecamatan Mamuju.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program KIP telah memberikan manfaat nyata bagi peserta didik penerima bantuan. Pihak sekolah menyampaikan bahwa bantuan KIP sangat membantu siswa, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar sekolah sehingga siswa tetap dapat mengikuti pembelajaran. Selain itu, penerima manfaat juga merasakan bahwa bantuan tersebut meringankan beban ekonomi keluarga dalam membiayai pendidikan anak. Namun demikian, efektivitas instrumen ini masih belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam ketepatan sasaran penerima dan ketepatan waktu pencairan bantuan. Keterlambatan pencairan dapat menghambat pemenuhan kebutuhan pendidikan, terutama pada awal tahun ajaran ketika siswa membutuhkan perlengkapan sekolah. Dengan demikian, pilihan instrumen kebijakan berupa bantuan tunai sudah tepat, tetapi keberhasilannya masih sangat bergantung pada perbaikan pendataan, ketepatan sasaran, dan kelancaran penyaluran bantuan.

### 3.2 Desain Kebijakan

Dimensi desain kebijakan dalam implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kecamatan Mamuju berkaitan dengan kejelasan tujuan, sasaran, mekanisme, dan strategi pelaksanaan program. Secara umum, Program KIP telah memiliki desain kebijakan yang jelas, yaitu memberikan bantuan pendidikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat bersekolah dan tidak mengalami putus sekolah. Sasaran program juga telah ditentukan, yaitu siswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, termasuk anak usia sekolah yang berisiko tidak melanjutkan pendidikan. Dengan adanya desain tersebut, pelaksanaan KIP di Kecamatan Mamuju diarahkan untuk membantu mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

Namun, dalam pelaksanaannya, desain kebijakan tersebut masih menghadapi kendala pada tahap penerjemahan kebijakan ke dalam praktik di lapangan. Masih ditemukan persoalan terkait data penerima bantuan yang belum sepenuhnya akurat, sehingga terdapat kemungkinan siswa yang layak menerima bantuan belum terdaftar, sementara sebagian penerima belum tentu sesuai dengan kondisi sasaran program. Selain itu, sosialisasi mengenai mekanisme KIP kepada masyarakat juga belum sepenuhnya merata, sehingga masih ada orang tua atau peserta didik yang belum memahami prosedur, syarat, dan pemanfaatan bantuan secara tepat. Dengan demikian, desain kebijakan KIP pada dasarnya sudah sesuai dengan tujuan menekan angka anak putus sekolah, tetapi efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui perbaikan pendataan, peningkatan sosialisasi, dan penyederhanaan mekanisme agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat penerima manfaat.

### 3.3 Kontrol Struktur

Dimensi kontrol struktur dalam implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kecamatan Mamuju berkaitan dengan mekanisme pengawasan, pemantauan, dan pelaporan agar program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, kontrol struktur dilakukan melalui keterlibatan Dinas Pendidikan, pihak sekolah, dan lembaga terkait dalam memastikan bahwa bantuan KIP disalurkan kepada peserta didik yang berhak menerima. Pengawasan ini penting karena KIP tidak hanya berfungsi sebagai bantuan dana, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk menjaga keberlanjutan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan KIP sudah dilakukan, terutama melalui pendataan siswa, verifikasi penerima, dan pemantauan penggunaan bantuan oleh pihak sekolah. Namun, kontrol struktur tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih terdapat kendala dalam pembaruan data, koordinasi antarlembaga, dan pelaporan pemanfaatan bantuan. Kondisi ini dapat menyebabkan bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran atau belum termanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan pendidikan. Dengan demikian, kontrol struktur dalam pelaksanaan KIP di Kecamatan Mamuju perlu diperkuat melalui pengawasan yang lebih rutin, pelaporan yang lebih tertib, serta koordinasi yang lebih intensif antara Dinas Pendidikan, sekolah, dan pihak terkait agar program benar-benar mampu menekan angka anak putus sekolah.

### 3.4 Desain Institusi

Dimensi desain institusi dalam implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kecamatan Mamuju berkaitan dengan kejelasan struktur pelaksana, pembagian tugas, serta hubungan kerja antarlembaga yang terlibat dalam program. Pelaksanaan KIP melibatkan beberapa aktor, seperti Dinas Pendidikan, pihak sekolah, operator sekolah, lembaga penyalur, serta masyarakat sebagai penerima manfaat. Masing-masing aktor memiliki peran yang saling berkaitan, mulai dari pendataan

calon penerima, verifikasi data, penyampaian informasi, hingga pemantauan pemanfaatan bantuan oleh peserta didik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain institusi dalam pelaksanaan KIP sudah terbentuk melalui keterlibatan Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan sebagai pelaksana utama di daerah. Sekolah berperan penting dalam mengusulkan dan memverifikasi data siswa, sedangkan Dinas Pendidikan berperan dalam koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan program. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala berupa koordinasi yang belum sepenuhnya intensif antara lembaga pelaksana, sekolah, dan masyarakat. Hal ini berdampak pada keterlambatan informasi, ketidaksamaan pemahaman prosedur, serta belum optimalnya respons terhadap data siswa yang belum terakomodasi. Dengan demikian, desain institusi Program KIP di Kecamatan Mamuju perlu diperkuat melalui pembagian tugas yang lebih jelas, komunikasi antarlembaga yang lebih aktif, serta peningkatan keterlibatan sekolah dan masyarakat agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran.

### 3.5 Kapasitas Administrasi

Dimensi kapasitas administrasi dalam implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kecamatan Mamuju berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia, ketersediaan sarana pendukung, pengelolaan data, serta kemampuan pelaksana dalam menjalankan program secara efektif. Kapasitas administrasi menjadi aspek penting karena keberhasilan KIP sangat bergantung pada kemampuan pelaksana dalam melakukan pendataan, verifikasi penerima, penyampaian informasi, penyaluran bantuan, dan pengawasan pemanfaatan dana. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan dan pihak sekolah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa bantuan KIP diterima oleh peserta didik yang benar-benar membutuhkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas administrasi pelaksana Program KIP di Kecamatan Mamuju sudah berjalan, tetapi masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kendala dalam pembaruan data penerima, keterbatasan sumber daya manusia yang menangani administrasi program, serta belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai prosedur KIP. Operator sekolah dan pihak terkait memiliki peran besar dalam pengelolaan data, namun beban kerja dan keterbatasan teknis dapat memengaruhi ketepatan serta kecepatan proses administrasi. Kondisi tersebut berdampak pada kemungkinan adanya siswa layak bantuan yang belum terdata atau keterlambatan dalam proses pencairan bantuan.

Dengan demikian, kapasitas administrasi dalam implementasi Program KIP di Kecamatan Mamuju perlu terus diperkuat. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaksana, pembaruan data secara berkala, pelatihan bagi operator sekolah, serta peningkatan koordinasi antara Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan. Apabila kapasitas administrasi semakin baik, maka pelaksanaan KIP akan lebih tepat sasaran, lebih tertib, dan lebih efektif dalam membantu menekan angka anak putus sekolah di Kecamatan Mamuju.

### 3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kecamatan Mamuju telah berjalan sesuai dengan mekanisme kebijakan yang ditetapkan, mulai dari pendataan calon penerima, verifikasi data, penetapan penerima, hingga penyaluran bantuan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu. Program ini memberikan manfaat nyata dalam membantu meringankan beban ekonomi keluarga, terutama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seperti perlengkapan sekolah, biaya transportasi, buku, dan kebutuhan penunjang lainnya. Temuan ini

menunjukkan bahwa KIP memiliki peran penting sebagai instrumen bantuan pendidikan dalam menjaga keberlanjutan sekolah bagi peserta didik yang rentan putus sekolah.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi Program KIP di Kecamatan Mamuju belum sepenuhnya optimal dalam menekan angka anak putus sekolah. Hal ini terlihat dari masih adanya anak putus sekolah di Kecamatan Mamuju meskipun program bantuan pendidikan telah berjalan. Kendala utama yang ditemukan berkaitan dengan ketidaktepatan data penerima, keterlambatan pembaruan data, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta koordinasi antarlembaga yang belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program KIP tidak cukup hanya ditentukan oleh adanya bantuan dana, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas tata kelola pelaksanaan program.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa program bantuan pendidikan membutuhkan pendataan, penyaluran, sumber daya manusia, dan koordinasi yang memadai agar dapat mencapai tujuan secara optimal (Madjid et al., 2021). Dalam konteks Kecamatan Mamuju, permasalahan administrasi dan koordinasi masih menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan KIP. Apabila data penerima belum akurat, maka bantuan berpotensi tidak sepenuhnya menjangkau peserta didik yang paling membutuhkan. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme KIP juga dapat menyebabkan pemanfaatan bantuan belum sepenuhnya diarahkan untuk kebutuhan pendidikan anak.

Berdasarkan lima dimensi implementasi kebijakan Christoph Knill dan Jale Tosun, temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pilihan instrumen kebijakan berupa bantuan tunai sudah relevan dengan tujuan menekan angka putus sekolah. Akan tetapi, desain kebijakan, kontrol struktur, desain institusi, dan kapasitas administrasi masih perlu diperkuat. Artinya, KIP sebagai kebijakan pendidikan telah memiliki dasar dan tujuan yang tepat, tetapi efektivitasnya di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam mengelola data, menyampaikan informasi, melakukan pengawasan, serta membangun koordinasi antara Dinas Pendidikan, sekolah, perangkat wilayah, dan masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Program KIP di Kecamatan Mamuju telah berkontribusi dalam membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan. Namun, kontribusi tersebut belum sepenuhnya mampu menekan angka anak putus sekolah secara optimal karena masih terdapat kelemahan pada aspek implementasi. Oleh karena itu, perbaikan pelaksanaan KIP perlu diarahkan pada peningkatan akurasi data penerima, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan kapasitas administrasi pelaksana. Dengan perbaikan tersebut, Program KIP diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih nyata dalam menekan angka anak putus sekolah di Kecamatan Mamuju.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam menekan angka anak putus sekolah di Kecamatan Mamuju telah berjalan sesuai dengan mekanisme kebijakan yang ditetapkan, terutama melalui pendataan, verifikasi, penetapan penerima, dan penyaluran bantuan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu. Program ini telah memberikan manfaat dalam meringankan beban ekonomi keluarga serta membantu peserta didik memenuhi kebutuhan pendidikan sehingga tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekolah. Namun, implementasi KIP di Kecamatan Mamuju belum sepenuhnya optimal dalam menekan angka anak putus sekolah karena pelaksanaannya masih membutuhkan penguatan

pada aspek ketepatan sasaran, pengelolaan data, koordinasi pelaksana, pengawasan, dan kapasitas administrasi. Dengan demikian, Program KIP memiliki peran penting sebagai instrumen kebijakan pendidikan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas implementasi di tingkat daerah dan satuan pendidikan.

**Keterbatan Penelitian**. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu ruang lingkup penelitian yang hanya difokuskan pada implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan pada wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, geografis, dan kapasitas kelembagaan yang berbeda. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sehingga hasil penelitian lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap proses pelaksanaan program, bukan pada pengukuran statistik mengenai besarnya pengaruh KIP terhadap penurunan angka anak putus sekolah. Keterbatasan lainnya terletak pada data dan informasi yang diperoleh dari informan serta dokumen yang tersedia selama penelitian, sehingga kemungkinan masih terdapat aspek lain di luar penelitian, seperti kondisi ekonomi keluarga, budaya masyarakat, motivasi belajar peserta didik, dan faktor lingkungan sosial yang turut memengaruhi angka anak putus sekolah di Kecamatan Mamuju.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)**. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan cakupan wilayah yang lebih luas, misalnya pada tingkat kabupaten atau beberapa kecamatan di Provinsi Sulawesi Barat, agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk mengukur secara lebih jelas pengaruh Program KIP terhadap penurunan angka anak putus sekolah. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain seperti kondisi ekonomi keluarga, motivasi belajar peserta didik, peran sekolah, partisipasi masyarakat, akses transportasi, serta faktor sosial budaya yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak. Dengan demikian, penelitian mendatang diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai efektivitas Program KIP sekaligus merumuskan strategi kebijakan yang lebih tepat dalam menekan angka anak putus sekolah di daerah.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin, data, dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian mengenai implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kecamatan Mamuju. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak sekolah, guru, masyarakat, serta peserta didik yang telah bersedia memberikan informasi selama proses penelitian. Selain itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing, keluarga, serta seluruh pihak yang telah memberikan arahan, dukungan, dan bantuan sehingga penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Daffa Athallah, A. L., Hamdi, M., & Rahmah, M. (2024). Faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 7*(2), 43–60. https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/4541

Dimmera, B. G., & Purnasari, P. D. P. (2020). Permasalahan dan solusi Program Indonesia Pintar dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Kabupaten Bengkayang. *Sebatik, 24*(2), 307–314. https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1137

Gutama, A. S., Fedryansyah, M., & Nuriyah, E. (2021). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan basis nilai keadilan dalam kebijakan sosial. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2*(3). https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.35872

Hidayatina, A., & Garces-Ozanne, A. (2019). Can cash transfers mitigate child labour? Evidence from Indonesia's cash transfer programme for poor students in Java. *World Development Perspectives, 15*, 100129. https://doi.org/10.1016/j.wdp.2019.100129

Iwan, I., & Rachmawati, I. (2024). Evaluasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam mendukung implementasi wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10*(22), 640–650. https://doi.org/10.5281/zenodo.14574716

Jumanah, J., & Rosita, H. (2023). Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) dalam upaya pemerataan pendidikan. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science, 4*(1), 52–66. https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i1.99

Knill, C., & Tosun, J. (2020). *Public policy: A new introduction* (2nd ed.). Red Globe Press.

Listiyanto, H. A., & Qibthiyyah, R. M. (2022). The impact of school voucher program on school dropouts in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Bisnis dan Manajemen, 8*(2), 113–127. https://journal2.um.ac.id/index.php/jpbm/article/view/29249

Madjid, U., Nurrahman, A., & Wahyuni, N. (2021). Implementasi program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat pendidikan dasar pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 11*(1), 65–84. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1989

Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 10*(1), 73–96. https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384

Nasution, D. A., & Mulyana, M. (2025). Pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik, 7*(1), 31–49. https://doi.org/10.33701/jpkp.v7i1.5204

Nikmah, F. A., Wardani, N. T., & Matsani, N. (2020). Apakah Kartu Indonesia Pintar berhasil menurunkan angka putus sekolah? *Jurnal Komunikasi Pendidikan, 4*(2), 72–78. https://doi.org/10.32585/jkp.v4i2.581

Prihatini, J., Bakuda, D. N., & Agung, E. P. (2024). Implementasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA Negeri tahun ajaran 2021/2022 di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Studi di Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Pemali. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 7*(1), 85–102. https://doi.org/10.33701/jkp.v7i1.4277

Putri, P. A. S., Ralita, R. A. P., Risma, R. R., Triya, T. A., & Yunizar, Y. F. (2024). Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Serang. *Jurnal Sosial, 25*(2), 60–68. https://doi.org/10.33319/sos.v25i2.303

Rahman, B., & Asmara, R. (2020). Implementasi Program Indonesia Pintar bagi siswa tingkat sekolah dasar. *HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 6*(1), 19–36. https://doi.org/10.52447/ijpa.v8i2.6042

Rakista, P. M. (2020). Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP): Studi kasus pada sekolah dasar di Kabupaten Banyumas. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara, 8*(2), 224–232. https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2774

Retnaningsih, H. (2017). Program Indonesia Pintar: Implementasi kebijakan jaminan sosial bidang pendidikan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 8*(2), 161–177. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i2.1263

Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam upaya pemerataan pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review, 2*(1), 193–204. https://jurnal.unigal.ac.id/ijemar/article/view/1824

Saputra, B. P., Suryani, E. I., & Yonawati, Y. (2025). Implementasi kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam meningkatkan akses pendidikan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5*(2), 1467–1476. https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1264

Sari, M., Musdalifah, S., & Asfar, E. A. (2021). Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan di MTsN 1 Watampone. *Jurnal Mappesona, 4*(1). https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/mappesona/article/view/1772

Setyadharma, A. (2018). Government's cash transfers and school dropout in rural areas. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, 11*(2), 447–461. https://doi.org/10.15294/jejak.v11i2.16125

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan: Teoritik, legalistik, empirik dan inovatif* (Cet. 3). Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suhada, A. (2024). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan: Studi di SDN Tonjong 1. *Jurnal Administrasi Publik Riset Inovatif, 1*(1), 64–74. https://doi.org/10.31949/japri.v1i1.11320

Susilo, H., & Wahyudi, S. T. (2020). Keeping rural children's hope to stay in the senior high school through conditional cash transfer: An Indonesian case. *Sebelas Maret Business Review, 5*(1), 1–16. https://doi.org/10.20961/smbr.v5i1.41197

Wijaya, R., & Aprilia, R. (2020). Implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 3*(2), 75–83. https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1377

Yusup, W. B., Ismanto, B., & Wasitohadi, W. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam peningkatan akses pendidikan di sekolah menengah pertama. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan, 6*(1), 44–53. https://doi.org/10.24246/j.jk.2019.v6.i1.p44-53

Zamaludin, M. E., Meigawati, D., & Sampurna, R. H. (2024). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan sekolah dasar negeri. *ELSE: Elementary School Education Journal: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar, 8*(2), 472–480. https://doi.org/10.30651/else.v8i2.19168